

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan.

Otonomi daerah mulai diberlakukan pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan yang diharapkan dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Kewenangan yang besar tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor, dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam

pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan adalah suatu proses perubahan tanpa henti yang merupakan kemampuan dan perbaikan kearah tujuan yang ingin dicapai. Strategi pembangunan ditekankan kepada perbaikan kualitas hidup masyarakat agar lebih merata dan sekaligus ditunjukkan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang memadai. Salah satu sektor yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah pembangunan di sektor informal.

Sektor informal merupakan pekerjaan alternatif yang dipilih oleh migrant di perkotaan demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pada umumnya merupakan jenis pekerjaan yang padat karya. Dalam artian bahwa tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, tidak diperlukan keterampilan khusus dan modal yang besar, karena tidak adanya kepastian hasil yang diperoleh dan kepastian keberlangsungan yang diperoleh, serta pendapatan yang diperoleh relatif kecil.

Sektor informal sebagai identitas problematika perkotaan berkembang diberbagai bidang meliputi bidang industri, perdagangan, jasa dan sebagainya. Profesi-profesi sektor ekonomi informal perkotaan meliputi pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual koran, penyemir sepatu, pelacur, portir, pengemis, pengemudi becak, tukang parkir dan sebagainya. Fenomena

---

<sup>1</sup> Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang Kota yang kacau. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam melakukan penataan PKL.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada, mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dan tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima. Namun tidak semua pemerintah daerah telah melakukan penataan pedagang kaki lima untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari PKL seperti halnya di Kabupaten Bantul. Saat pemerintah kabupaten Bantul baru pada tahap pemberdayaan, belum melakukan upaya penataan.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap PKL sampai saat ini berupa pemberian tenda dagang sebanyak 70 tenda kepada para PKL di 5 lokasi. Hal ini berdasarkan informasi yang termuat pada Harian Jogja Minggu, 6 Juli 2014, menurut bapak Sulisyanto selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, pihak pemerintah Bantul telah memberikan bantuan tenda PKL untuk membantu pemberdayaan

serta meningkatkan pendapatan pedagang sekigus sebagai upaya penataan PKL sesuai dengan peraturan daerah bantul no 07 tahun 2014. Saat ini kabupaten bantul ada 1.700 pedagang yang telah resmi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan seperti kategori lesehan, shelter, dan gelaran. Dan berdasarkan data yang di unduh dari website resmi kabupaten bantul, saat ini pedangan kaki lima tersebut tersebar di limas belas (15) titik di kabupaten bantul seperti di kecamatan Sanden, kecamatan Sewon, kecamatan Pajangan, kecamatan Piyungan, kecamatan Sedayu, kecamatan Dlingo, kecamatan Banguntapan, kecamatan Pleret, kecamatan Pundong, kecamatan Jetis, kecamatan Srandakan, kecamatan Kretek, kecamatan Bambanglipuro, kecamatan Imogiri, kecamatan Pandak, dan kecamatan Kasihan.<sup>2</sup>

Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan. PKL sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan term "PKL" berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku/meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya maka menjadi berkaki lima sehingga timbullah julukan pedagang kaki lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai PKL sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (*5feet*) dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai PKL dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan

---

<sup>2</sup> Sumber data PDF di unduh dari website resmi kabupaten Bantul Rabu, 01 Oktober 2014 jam 11.00

secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.

Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semerawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan PKL, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para PKL tetap ngotot untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan para PKL, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah PKL terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban dan penataan PKL dapat diwujudkan.

Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Keberadaan PKL menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencarikan solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.

Pembangunan ekonomi yang di mulai dari pasar tradisional ternyata menimbulkan berbagai dampak negative bagi tata ruang kota di Kabupaten Bantul itu sendiri, banyaknya masyarakat yang memilih mencari nafkah dengan berdagang ternyata belum bisa memanfaatkan pasar tradisional tersebut sebagai tempat untuk berdagang, mereka lebih memilih berdagang di pinggir pinggir jalan atau menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Melalui penelitian ini penulis ingin menganalisa proses pemberdayaan dan penataan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai *Shadow Economy*. Namun,

mengingat bahwa kontribusi PKL sangat besar bagi semua kalangan masyarakat. Keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu.

Pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari *win-win solution* atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata Kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan PKL melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemerintah kabupaten dapat menarik retribusi dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian permasalahan diatas maka yang ingin penulis teliti adalah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan dalam



upaya melakukan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan penataan pedagang kaki lima.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori merupakan suatu landasan dalam membahas permasalahan yang akan diteliti agar tidak melenceng dari topic yang akan diteliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan diteliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.<sup>3</sup> Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka peneliti menggunakan beberapa teori yaitu:

---

<sup>3</sup>Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan teori social*. Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal2.

## 1. Pemberdayaan Masyarakat.

### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi.

Mubyarto menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.<sup>4</sup>

Istilah "pemberdayaan masyarakat" sebagai terjemahan dari kata "*empowerment*", hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan World bank dalam bulletinya Vol. 11 no.4 / Vol. 2 no. 1 oktober-desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari strategi trisula (*three-pronged-strategy*) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an yang terdiri dari penggalangan peluang (*promoting*

---

<sup>4</sup>Mubyarto, 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES, Jakarta.

*opportunity*) fasilitas pemberdayaan dan peningkatan keamanan (*enhancing security*).<sup>5</sup>

Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi secara *power* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut ini:

- 1) *Learning by doing* artinya pemberdayaan sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan yang kongkrit yang terus menerus dampaknya dapat terlihat.
- 2) *Problem solving*. Pemberdayaa harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- 3) *Self-evaluation*. Pemberdayaa harus mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- 4) *Self-selection*. Suatu kumpulan tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan.
- 5) *Self-development and coordination*. Artinya mendorong seseorang atau kelompok tersebut melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, ALFABETA, 2013

- 6) *Self decisim dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Saraswati, 1997; 79-80).*<sup>6</sup>

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

- b. Lingkup dan Tahapan Kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh

---

<sup>6</sup>Dr. Alfitri, M.Si, *Community development teori dan aplikasi*, Pustaka pelajar, 2011 hal: 24

masyarakat), baik daya dalam artian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar-menawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan (*income generating*).<sup>7</sup>

Tantang hal ini, Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan itu hanya dapat terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.<sup>8</sup>

Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Willson dalam (Sumaryadi, 2004) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam organisasi, merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari:

*Pertama*, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si Opcit hal:113

<sup>8</sup> Ibid

pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat. *Kedua*, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/ kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan. *Ketiga*, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. *Keempat*, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. *Kelima*, peningkatan peran kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. *Keenam*, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. *Ketujuh*, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.<sup>9</sup>

Tentang hal ini, Tim Delivery menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut: (1) Seleksi lokasi, Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh

---

<sup>9</sup> Sumaryadi, I,N, *perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta. citra Utama. 2004

lembaga, pihak-pihak dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai. (2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi merupakan upaya megkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisai akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan mentukan minat- atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan. (3) Proses pemberdayaan masyarakat, Hakikat pembrdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

(a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan , serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi: Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya. Persiapan

penyelenggaraan pertemuan. Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan. Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

(b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi: Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah. Identifikasi alternatif pemecahan masalah terbaik. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah. Pengembangan rencana kegiatan serta pengornisasian pelaksanaannya.

(c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pemdamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

(d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participacy monitoring and evaluation/ PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan baik *prosesnya* (pelaksanaan) maupun *hasil dan dampaknya* agar dapat disusun proses perbaikan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Delivery, 2004a, *pemberdayaan masyarakat*, [http://www.deliveri.org/gudelines/policy/pg\\_3summaryi.htm](http://www.deliveri.org/gudelines/policy/pg_3summaryi.htm)



Tujuan dasar dari pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya yang saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar, demikian Payne menulis dalam buku *modern social work theory* (1997:286).<sup>11</sup>

## 2. Penataan Sektor informal

### a. Penataan Sektor Informal

Penataan sektor informal yang dimaksud dalam kajian teori ini adalah penataan pedagang kaki lima di wilayah kabupaten bantul sebagai yang ditulis dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor 07 tahun 2014 pasal (1) ayat (7) bahawasanya penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penataan ini dengan cara : (a) Pendataan PKL, (b) Pendaftaran PKL, (c) Penetapan lokasi PKL, (d) Pemindahan PKL.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Dr. Alfitri, opcit : 23

<sup>12</sup> Peraturan daerah kabupaten Bantul nomor 07 tahun 2014

b. Sektor Informal

Dalam mengkaji sektor informal, perhatian di pusatkan pada sektor informal diperkotaan. Sektor informal di artikan sebagai sebagai pekerja yang berusaha sendiri tanpa buruh, berusaha sendiri dengan buruh tak tetap, atau di bantu tenaga kerja keluarga tidak dibayar.<sup>13</sup>

Menurut Wirosandjojo dalam Harris Koentjoro, sektor informal merupakan bagian dari kegiatan-ekonomi-marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri antara lain

- a) Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, permodalan maupun penerimaan ;
- b) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya kecil dan diusahakan berdasar hitungan harian;
- c) umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya;
- d) tidak memiliki keterikaitan dengan usaha lain yang besar;
- e) umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f) tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan ketrampilan kerja;

---

<sup>13</sup>Effendi, Tadjuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara wacana Hal: 80

g) umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama; dan

h) tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal (Wirosandjojo, 1985 dalam Koentjoro, 1994).<sup>14</sup>

Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padatKarya) dan teknologi di pakai secara relative sederhana. Mereka menjalankan pemeliharaan perusahaan seperti halnya perusahaan memonopoli persaingannya dalam menghadapi penurunan pemasukan, kelebihan kapasitas dan mengendalikan persaingan laba (pendapatan) yang menurun rata-rata harga penawaran tenaga kerja potensial yang baru. Para pekerja menciptakan sendiri lapangan pekerjaannya di sektor informal biasanya tidak memiliki pendidikan formal. umumnya mereka tidak mempunyai keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup><http://teknik.ums.ac.id/kuliah/ruhiko/file/A5-PDF.hlm> 67

<sup>15</sup>Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke Tiga*. Jakarta: Erlangga Hal:351-352

### 3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan penataan PKL

Proses dalam pemberdayaan masyarakat tentunya juga mengalami berbagai kendala dan juga adanya faktor pendukungnya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terjadi didalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :<sup>16</sup>

#### a) Faktor pendukung

##### 1) Partisipasi masyarakat

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah *partisipasi* adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian tersebut yang dikemukakan oleh berapa kamus bahasa sosiologi.<sup>17</sup> Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Disadur dari winarni,tri, 1998,*memahami pemberdayan masyarakat Desa partisipasif dalam orientasi pembangunan masyarakat desa : menuju pemberdayaan pelayanan masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm 75-76

<sup>17</sup> Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, Op.cit hal:81

<sup>18</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*.Adicipta. Yogyakarta. Hal:201-202

2) Potensi sumber daya alam

b) Faktor penghambat

(1) Kurangnya bantuan dari pemerintah

(2) Masyarakat desa belum bisa menerima hal-hal yang baru.

#### 4. Konsep Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian pedagan kaki lima

Menurut Ramli, Pedagang kaki lima pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai karekteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan sering diidentikkan sebagai pedagang kaki lima.<sup>19</sup>

McGee dan Yeung, Istilah pedagang kaki lima sebenarnya telah ada dari jaman Raffles yaitu berasal dari istilah 5 feet yang berarti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Di Amerika, pedagang semacam ini disebut dengan Hawkers yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>20</sup>

Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah karena:

<sup>19</sup>Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan. Jakarta: Ind-Hill-co. Hal: 31

<sup>20</sup>McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977 Hawkers in Southeast Asian Cities: *Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre. Hal:25

- 1) Terpaksa : terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal
- 2) Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain
- 3) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua
- 4) Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sampingan
- 5) Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian PKL menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja. Hal tersebut dipandang dari ruang aktifitas usaha pedagang kaki lima yang semakin luas, dimana tidak hanya menggunakan hampir semua ruang publik seperti jalir-jalur pejalan kaki, area parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal perempatan jalan tapi juga dalam melakukan aktifitasnya pedagang kaki lima bergerak keliling rumah melalui jalan-jalan kecil di perkotaan.

---

<sup>21</sup> Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. 2006. Surabaya: ITS Press. Hlm 147

b. Karakteristik PKL

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tidak memiliki izin resmi sehingga usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian, serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (1989) sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel
- 2) Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil
- 3) Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha

Berikut ini akan dijabarkan mengenai karakteristik aktivitas PKL yang dilihat dari segi sarana fisik dan pola pelayanan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.

<sup>23</sup>Simanjutak, Payaman J. 1989. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal: 44

1) Sarana fisik berdagang PKL

PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bentuk fisik dagangan bagi PKL bukan merupakan bangunan permanen tetapi bangunan yang mudah untuk dibongkar pasang dan dipindahkan. Menurut Waworoentoe (Widjajanti, 2000), sarana fisik pedagang PKL dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

b) Warung semi permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangkubangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

c) Gerobak/Kereta dorong

Bentuk sarana berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak/kereta dorong yang beratap sebagai pelindungan



untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

d) Jongkok/Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.

e) Gelaran/alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.

f) Pikulan atau keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

2) Pola pelayanan kegiatan PKL

Pola pelayanan PKL erat kaitannya dengan sarana fisik dagangan PKL yang digunakan dan jenis usahanya. Adapun

menurut Hanarti (1999), pengelompokan aktivitas perdagangan sektor informal berdasarkan pola pelayanan kegiatannya dikategorikan atas fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan. Untuk lebih jelas terkait dengan pengkategorian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>24</sup>

(a) Fungsi layanan

Penentuan jenis fungsi pelayanan dari suatu aktivitas pedagang sektor informal (PKL) dapat ditentukan dari dominasi kuantitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkannya. Suatu lokasi aktivitas PKL dapat memiliki lebih dari satu fungsi secara sekaligus. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh aktivitas PKL dalam kehidupan perkotaan secara umum dibagi menjadi tiga fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Fungsi pelayanan perdagangan dan jasa

Aktivitas pedagang kaki lima merupakan bagian dari sistem perdagangan kota khususnya dalam bidang pedagang eceran. PKL dalam hal ini berfungsi memasarkan hasil produksi suatu barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen akhir.

---

<sup>24</sup> Hanarti, Marantina. 1999. *Studi Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Aktivitas Perdagangan dan Jasa Sektor Informal di Kawasan Pusat Perdagangan Johar Semarang*. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Hal:31

(2) Fungsi pelayanan rekreasi

Aktivitas PKL memiliki fungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif yaitu hiburan sebagai selingan dari kesibukan dan rutinitas kegiatan perkotaan. Fungsi rekreatif ini didapatkan dari suasana pelayanan yang diberikan misalnya lokasi di alam terbuka dapat dipakai sebagai tempat santai, jalan-jalan cuci mata, dan sebagainya.

(3) Fungsi pelayanan sosial ekonomi

Aktivitas PKL secara umum telah dikemukakan memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat luas bila dikelola dengan baik. Aktivitas PKL memiliki fungsi sosial ekonomi yang dilihat berdasarkan pandangan masing-masing pelaku yang terlibat didalamnya.

(b) Golongan pengguna jasa

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas pedagang sektor informal pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari tarif harga aktivitas perdagangan tersebut yang relatif rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan penduduk berpendapatan tinggi cenderung tidak pergi ke aktivitas perdagangan tersebut.

(c) Skala pelayanan

Skala pelayanan suatu aktivitas PKL dapat diketahui dari asal pengguna aktivitasnya. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya asal penggunanya. Semakin dekat asal penggunanya maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal penggunanya maka skala pelayanannya semakin besar.

(d) Waktu pelayanan

Pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal atau kondisi yang ada. Terdapat juga perbedaan pada setiap periode waktu pelayanan, baik dari segi jumlah PKL maupun jumlah pengguna jasanya (McGee dan Yeung).<sup>25</sup> Saat-saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi aktivitas jasa tersebut terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Saat-saat teramai tersebut bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan rekreasi, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. Op.cit Hal 76,89

<sup>26</sup> Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 228-233

(e) Sifat layanan

Berdasarkan sifat pelayanannya (McGee dan Yeung ), pedagang sektor informal dibedakan atas pedagang menetap (static), pedagang semi menetap (semi static), dan pedagang keliling (mobile). Pengertian tentang ketiga sifat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>27</sup>

i. Pedagang menetap (*static hawkers units*)

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang itu berada.

ii. Pedagang semi menetap (*static hawkers units*)

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja dengan jangka waktu lama (ada batas waktu tertentu). Dalam hal ini dia akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, pada saat para pegawai mau masuk/pulang kantor, atau pada saat-saat ramainya pengunjung ke pusat kota. Apabila kemungkinan pembeli yang cukup besar tersebut tidak

---

<sup>27</sup> McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. Op.cit Hal 82-83

dijumpai, maka pedagang tersebut akan berkeliling, demikian seterusnya.

iii. Pedagang keliling (*semistatic hawkers units*)

Pedagang keliling adalah suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat untuk selalu berusaha mendatangi atau "mengejar" konsumen dengan bergerak atau berpindah-pindah tempat. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

#### E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi konsepsional ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.<sup>28</sup> Sedangkan maksud dari definisi konsepsional yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

1. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap

---

<sup>28</sup>Singarimbun Masri, 1992. *Metode penelitian survey*, Jakarta LP3S, Hal 34.

PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan penataan PKL merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat proses pemberdayaan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal pada pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima.

#### **F. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Sedangkan variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai variasi/ukuran/score.<sup>29</sup> Untuk mengetahui proses pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima, maka indikator yang digunakan sebagai tolak ukurnya Kemudian untuk melihat bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul maka akan dilihat hasil penataan tersebut. Beberapa indikoator untuk mengetahui

---

<sup>29</sup>Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta. LP3ES. Hal 46

bagaimana proses pemberdayaan dan penataan tersebut. Dan adapun indikator yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

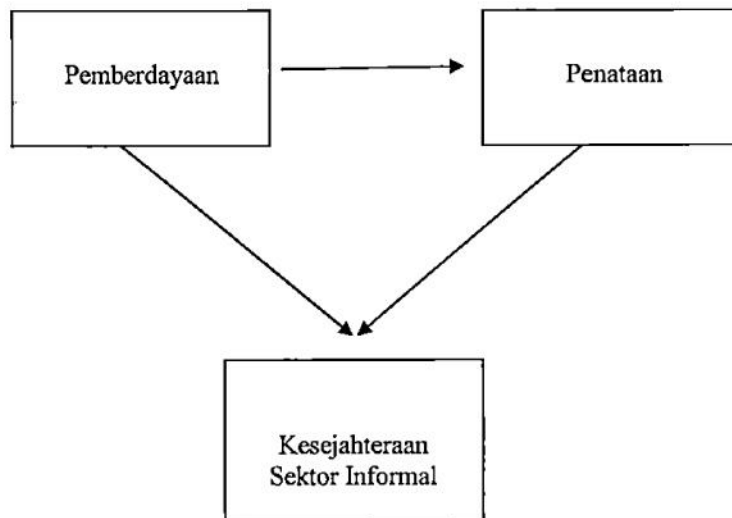
#### Pemberdayaan

- 1 Upaya dalam pengembangan diri
- 2 Upaya dalam peningkatan kualitas sumberdaya
- 3 Upaya pemberian optimasi daya untuk meningkatkan kemampuan
- 4 Upaya menuju kemandirian

#### Penataan

1. Penetapan lokasi baru
2. Pemindahan pedagang kaki lima
3. Penertiban pedagang kaki lima
4. Penghapusan lokasi pedagang kaki lima

Gambar 1.1. Bagan kesejahteraan sektor informal





Dari bagan diatas menerangkan bahwa pemberdayaan merupakan bentuk upaya tawar menawar yang pemerintah lakukan terhadap para pedagang kaki lima agar bisa dilakukan penataan. Sehingga jika pemberdayaan dan penataan dilakukan secara optimal akan menghasilkan kesejahteraan pada sector informal khususnya pedagang kaki lima.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### **2. Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bantul
- 2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
- 3) Pedagang kaki lima

### **3. Jenis Data**

---

<sup>30</sup>Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi, revisi). Bandung. PT Remaja: Rosdakarya. Hal 4

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan.

Tabel 1.1. Data primer

Data Primer	Sumber
Wawancara	Pemerintah kabupaten Bantul
	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
	Pedagang kaki lima
Observasi	Data temuan lapangan
FGD ( <i>Focus Group Discussion</i> )	Pemerintah daerah kabupaten Bantul

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan,

<sup>31</sup>Rahmawati, Dian Eka. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>32</sup> Ibid

literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**Tabel 1.2. Data Sekunder**

Data Primer	Sumber
Dokumentasi	- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 07 tahun 2014
	- Dokumen data PKL Kabupaten Bantul
	- Permendagri no 41 tahun 2012 tentang pedagang kaki lima
	- Lakip
	- Renstra SKPD terkait

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuan ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu

wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.<sup>33</sup>

Dengan demikian, maka ciri-ciri pokok dari wawancara, adalah sebagai berikut:

- a. Didalam wawancara diperlukan perilaku yang senantiasa saling menyesuaikan diri, terutama dari pewawancara.
- b. Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, perasaan, pikiran, kepercayaan, dan hal-hal yang mengingat faktor-faktor tersebut.
- c. Wawancara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan perbagai tipe pertanyaan.
- d. Perluasan ruang lingkup, dimungkinkan didalam wawancara.
- e. Didalam wawancara seringkali tidak ada waktu untuk mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik.
- f. Dalam wawancara, maka yang diwawancarai mempunyai kedudukan yang terbuka maupun peranan yang terbuka.

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008 Hlm 226

g. Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawacarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut.

Menurut Stewart dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.<sup>34</sup> Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) untuk mendapatkan data yang sebenarnya dengan unit analisa yaitu: Pemerintah Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan Pedagang Kaki Lima.

b. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data statistik, maupun dokumen perundang-undangan dan dokumen lainnya yang ada di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

c. Kuisioner

---

<sup>34</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta. Salemba Humanika. Hal 118

<sup>35</sup> Ibid Hal 143

Menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap.<sup>36</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, Kuesioner/angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.<sup>37</sup>

Dengan demikian angket/kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Angket tersebut pada akhirnya diberikan kepada responden untuk dimintakan jawaban.

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberikan tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Selanjutnya angket menurut Suharsimi Arikunto, dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>36</sup> Mohammad Nzair. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia. Jakarta.

<sup>37</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

1. Angket terbuka yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Angket terbuka dipergunakan apabila peneliti belum dapat memperkirakan atau menduga kemungkinan alternatif jawaban yang ada pada responden.
2. Angket tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom atau tempat yang sesuai.
3. Angket campuran yaitu gabungan antara angket terbuka dengan angket tertutup.

Angket sebagai alat pengumpul data mempunyai beberapa keuntungan. Menurut Suharsimi Arikunto keuntungan menggunakan angket antara lain:

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti
2. Dapat diberikan secara serempak kepada banyak responden
3. Dijawab oleh responden menurut kecepatan masing-masing dan menurut waktu senggang responden
4. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab

5. Dapat dibuat berstandar sehingga semua responden dapat diberi

Dalam penelitian ini mengapa peneliti menghadirkan kuisioner sebagai salah satu alat pengumpulan data karena untuk menguji keabsahan hasil wawancara dengan informan yang lain serta untuk melihat aspek lain yang akan menjadi pembahasan dalam bab berikutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 20 responden dengan menggunakan *Non-Probability Sampling*. Non-probability sampling Sugiyono mengemukakan bahwa teknik pengambilan sample yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>38</sup> Pemilihan teknik pengambilan sample *non-probability* ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan waktu, dana, waktu dan tenaga peneliti serta populasi yang bersifat homogen.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

---

<sup>38</sup> Sugiyono. (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.



(*conclusion drawing*).<sup>39</sup> Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan focus.

Setelah dilakukannya identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan observasi untuk dianalisis, kemudian memilah data-sekunder yang terkait yang terkait dengan kajian permasalahan seperti program pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima dan media cetak lainnya yang berupa jurnal dan buku referensi. Dari hasil analisis kedua jenis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai tujuan dalam penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh :

### 1. Bab I

Pada bab I penulis membagigak menjadi

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah

---

<sup>39</sup>Lisa, Ridvia. 2010. *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Padang. Universitas Negeri Padang.

- c. Tujuan dan manfaat penelitian
- d. Kerangka teori
- e. Definisi konseptual
- f. Definisi operasional
- g. Metodologi penelitian

## 2. Bab II

Pada bab II penulis menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian yaitu profil daerah dan sejarah serta pengertian pedagang kaki lima dengan tujuan untuk memudahkan dalam penelitian.

## 3. Bab III

Pada bab III penulis akan menjelaskan hasil analisa dan pengumpulan data yang akan peneliti lakukan

## 4. Bab IV

Penutup, berisi kesimpulan, saran dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya.